



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE/ *19* /XI/2022**

TENTANG

**PENJELASAN DAN TINDAK LANJUT ATAS AKUN
DENGAN URAIAN NULL DALAM LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

1. **Dasar:**
 - a. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-45/PB/PB.6/2022 tanggal 8 November 2022 tentang Penjelasan dan Tindak Lanjut atas Akun dengan Uraian NULL dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III Tahun 2022.
 - b. Surat Kapuslapbinkuhan Kemhan Nomor: B/2049/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penyusunan dan Penyampaian LK Kemhan TW III TA. 2022.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, disampaikan untuk penyusunan Laporan Keuangan Kemhan TW III Tahun 2022 disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Telah dilakukan *cut-off* atas *summary* data dari Aplikasi SAKTI ke Aplikasi MONSAKTI pada tanggal 23 Oktober 2022 sesuai surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-40/PB/PB.6/2022.
 - b. Dengan demikian, Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022 untuk setiap jenjang unit akuntansi dan unit pelaporan dapat diunduh dari Aplikasi MONSAKTI mulai tanggal 24 Oktober 2022.
 - c. Berdasarkan hasil monitoring data LK Kemhan dan TNI Triwulan III Tahun 2022 melalui Aplikasi MONSAKTI, ditemukan akun-akun dengan uraian NULL pada Neraca Percobaan, sehingga berdampak pada perbedaan nilai surplus/defisit pada Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Akun-akun dengan uraian NULL tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - 1) Akun pendapatan (425xxx) dengan uraian NULL di sisi kredit.
 - 2) Akun pendapatan (425xxx) dengan uraian NULL di sisi debit
 - 3) Akun belanja modal (53xxxx) dengan uraian NULL di sisi kredit.
 - 4) Akun belanja barang yang menghasilkan persediaan dengan uraian NULL di sisi kredit.
 - 5) Akun belanja barang yang menghasilkan persediaan dengan uraian NULL di sisi debit.

- 6) Akun belanja modal (53xxxx) dengan uraian NULL di sisi debet.
- d. Terhadap permasalahan di atas, U.O di lingkungan Kemhan dan TNI agar segera melakukan tindak lanjut dengan melakukan ralat akun pada dokumen setoran/penerimaan dan/atau melakukan jurnal-jurnal melalui Modul GLP, sehingga permasalahan tersebut tidak terakumulasi dalam LK Tahun 2022. Penjelasan lebih detail terkait akun-akun dengan uraian NULL beserta tindak lanjutnya adalah sebagaimana dituangkan dalam lampiran surat ini. Tindak lanjut yang dilakukan oleh UO di lingkungan Kemhan dan TNI disajikan dalam laporan keuangan tahun 2022.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan agar segera menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker di jajaran U.O masing-masing untuk:
- a. Memonitor seluruh akun dengan uraian NULL pada satker dilingkup kerjanya dengan mengoptimalkan menu-menu yang tersedia pada Aplikasi MONSAKTI.
- b. Mengkoordinasi seluruh satker yang memiliki permasalahan tersebut untuk segera melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Memastikan bahwa permasalahan serupa tidak terjadi dalam LK Tahun 2022.
4. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2022

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan.

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan
7. Dirjen Renhan Kemhan.

Lampiran I
 Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan
 Nomor : SE/ 19 /XI/2022
 Tanggal : 11 November 2022

Penjelasan dan Tindak Lanjut atas Akun-akun dengan Uraian NULL dalam LK Triwulan III Tahun 2022

Berdasarkan hasil monitoring data melalui Aplikasi MONSAKTI *cut-off* data per 23 Oktober 2022 yang digunakan dalam penyusunan LK Triwulan III Tahun 2022, ditemukan akun-akun dengan uraian NULL dalam Neraca Percobaan yang berdampak pada perbedaan nilai surplus/defisit antara LO dan LPE. Penjelasan mengenai akun-akun tersebut beserta tindak lanjut yang harus dilakukan oleh satker adalah sebagai berikut:

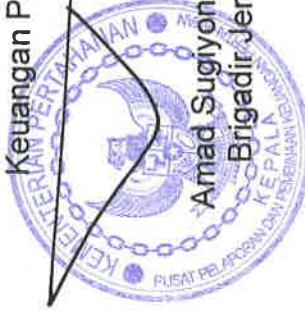
No	Permasalahan	Indikasi Penyebab	Tindak Lanjut
1	Terdapat akun pendapatan (425xxx) dengan uraian NULL di sisi kredit pada buku besar kas dan buku besar akrual.	Terdapat setoran pendapatan (akun 425xxx) menggunakan akun yang tidak seharusnya (misalnya akun BUN)	Satker mengajukan ralat dokumen setoran/penerimaan dengan berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada SPAN.
2	Terdapat akun pendapatan (425xxx) dengan uraian NULL di sisi debet pada buku besar akrual.	Terdapat kesalahan pemilihan akun ketika melakukan jurnal melalui Modul GLP	Satker melakukan jurnal melalui Modul GLP untuk mengeliminasi akun NULL dan memunculkan akun yang seharusnya.
3	Terdapat akun belanja modal (53xxx) dengan uraian NULL di sisi kredit pada buku besar akrual	Terdapat transaksi pengembalian belanja modal yang belum diikuti jurnal melalui Modul GLP	1. Satker merekam transaksi koreksi nilai pada Modul Aset Tetap akibat adanya pengembalian belanja modal, sehingga terbentuk jurnal: (D) Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi (K) Aset Tetap/Aset Lainnya

			<p>(D) Akumulasi Penyusutan/Amortisasi (K) Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi</p> <p>2. Satker melakukan jurnal melalui Modul GLP: (D) Akun 53xxxx (sesuai akun belanjanya) (K) Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi</p>
4	<p>Terdapat akun belanja barang yang menghasilkan persediaan (5218xx, 523xxx, 525xxx) dengan uraian NULL di sisi kredit pada buku besar akrual.</p>	<p>Terdapat transaksi pengembalian belanja barang yang menghasilkan persediaan TAB yang belum diikuti jurnal melalui Modul GLP.</p>	<p>1. Satker merekam transaksi koreksi nilai pada Modul Persediaan akibat adanya pengembalian belanja barang yang menghasilkan persediaan, sehingga terbentuk jurnal: (D) Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (K) Persediaan</p> <p>2. Satker agar melakukan jurnal melalui Modul GLP: (D) Akun 5218xx, 523xxx, 525xxx (sesuai akun belanjanya) (K) Beban Penyesuaian Nilai Persediaan</p>
5	<p>Terdapat akun belanja barang yang menghasilkan persediaan (5218xx, 523xxx, 525xxx) dengan uraian NULL di sisi debet pada buku besar akrual</p>	<p>a. Terdapat pencatatan belanja barang yang menghasilkan persediaan pada Modul Komitmen namun satker memilih BAST barang ekstrakomptabel</p>	<p>1. Pendetailan pada Modul Aset Tetap harus mengikuti pilihan BAST-nya (barang ekstrakomptabel)</p> <p>2. Jika barang yang dihasilkan seharusnya persediaan, lakukan transaksi reklasifikasi dari barang ekstrakomptabel ke persediaan, sehingga otomatis terbentuk jurnal reklasifikasi masuk persediaan: (D) Persediaan (K) Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya</p>

<p>3. Atas kondisi nomor 2, lakukan jurnal pada Modul GLP: (D) Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya (K) Akun 5218xx, 523xxx, 525xxx (sesuai akun belanjanya)</p> <p>4. Jika barang yang dihasilkan sudah benar (merupakan barang ekstrakomptabel) dan telah dilakukan pencatatan, lakukan jurnal pada Modul GLP: (D) Beban Ekstrakomptabel (akun 52125x atau 52516x) (K) Akun 5218xx, 523xxx, 525xxx (sesuai akun belanjanya)</p> <p>5. Jika riiil barang yang dihasilkan adalah barang ekstrakomptabel sebagaimana nomor 4, satker melakukan ralat akun pada dokumen pelaksanaan dan/atau penganggaran dari akun belanja barang yang menghasilkan persediaan menjadi akun belanja ekstrakomptabel, sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014.</p>		
<p>1. Dalam hal realisasi belanja barang yang menghasilkan persediaan tersebut secara riil menghasilkan persediaan, satker merekam persediaan pada Modul Persediaan melalui menu perolehan lainnya, sehingga terbentuk jurnal: (D) Persediaan (K) Pendapatan Perolehan Lainnya</p> <p>2. Satker agar melakukan jurnal melalui Modul GLP: (D) Pendapatan Perolehan Lainnya (K) Akun 5218xx, 523xxx, 525xxx (sesuai akun belanjanya)</p>	<p>b. Terdapat realisasi belanja barang yang menghasilkan persediaan, namun satker tidak merekam BAST pada Modul Komitmen. Satker langsung merekam SPP dengan akun belanja barang yang menghasilkan persediaan tanpa BAST.</p>	

6	<p>Terdapat akun belanja modal (53xxxx) dengan uraian NULL di sisi debet pada buku besar akrual</p>	<p>Terdapat realisasi belanja modal (53xxxx) namun satker tidak merekam BAST pada Modul Komitmen. Satker langsung merekam SPP dengan akun 53xxxx tanpa BAST.</p>	<p>1. Dalam hal realisasi belanja modal tersebut secara riil: menghasilkan aset tetap/aset lainnya, satker merekam aset tetap/aset lainnya pada Modul Aset Tetap melalui menu perolehan lainnya, sehingga terbentuk jurnal: (D) Aset Tetap/Aset Lainnya (K) Pendapatan Perolehan Lainnya</p> <p>2.. Satker agar melakukan jurnal melalui Modul GLP: (D) Pendapatan Perolehan Lainnya (K) Akun 53xxxx (sesuai akun belanjanya)</p>
---	---	--	---

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan



Amad Sugryono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran II
Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan
Nomor : SE/ 19 /XI/2022
Tanggal : 11 November 2022

ILUSTRASI PERMASALAHAN YANG MENIMBULKAN
AKUN-AKUN DENGAN URAIAN NULL

1. Terdapat akun pendapatan (425xxx) dengan uraian NULL di sisi kredit pada buku besar kas dan buku besar akrual

Ilustrasi 1a: penerimaan melalui penyetoran oleh wajib bayar ke kas negara

Pada Satker Z, terdapat pengembalian belanja barang TAYL (425912) senilai Rp3.500.000 yang disetorkan ke kas negara oleh penyedia barang dan jasa menggunakan akun penerimaan kembali belanja hibah TAYL (425916). Akun 425916 merupakan akun yang seharusnya digunakan oleh satker lingkup Bendahara Umum Negara (BUN) yang memiliki tugas dan fungsi merealisasikan belanja hibah (56xxxx), dalam hal ini Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko serta Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah. Transaksi tersebut berdampak pada munculnya akun 425916 dengan uraian NULL dalam Neraca Percobaan serta selisih nilai surplus defisit antara LO dengan LPE pada Satker Z. Pencatatan yang timbul dari transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Atas penyetoran yang dilakukan oleh wajib bayar ke kas negara, Satker Z melakukan pencatatan data penerimaan (Non Surat Bukti Setor/SBS) pada Modul Bendahara atau melakukan *upload* data penerimaan dari SIMPONI, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	3.500.000	LPE
K	425916	NULL	3.500.000	-
Buku Besar Kas				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterbitkan dari Entitas Lain	3.500.000	-
K	425916	Penerbitan Kembali Belanja Hibah TAYL	3.500.000	LRA
Buku Besar Kas				

- b. Atas kondisi ini, satker menindaklanjuti dengan melakukan ralat dokumen setoran (Bukti Penerimaan Negara/BPN) dengan berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014. Penghapusan BPN lama dan pencatatan ralat BPN pada SAKTI menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	425916	NULL	3.500.000	-
K	313121	Diterima dari Entitas Lain	3.500.000	LPE
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	3.500.000	LPE
K	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	3.500.000	LO
Buku besar akrual				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL	3.500.000	LRA
K	313121	Diterima dari Entitas Lain	3.500.000	-
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	3.500.000	-
K	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	3.500.000	LRA
Buku besar kas				

Ilustrasi 1b: penerimaan melalui penyetoran oleh wajib bayar ke bendahara, selanjutnya bendahara yang melakukan penyetoran ke kas negara

Pada Satker Z, terdapat pengembalian belanja honor TAYL senilai Rp1.000.000, di mana pegawai yang bersangkutan melakukan pengembalian melalui bendahara. Pengembalian belanja barang TAYL yang seharusnya menggunakan akun 425912 dilakukan penyetoran oleh bendahara ke kas negara menggunakan akun penerimaan kembali belanja hibah TAYL (425916). Transaksi dengan akun yang tidak seharusnya digunakan oleh K/L tersebut berdampak pada munculnya akun 425916 dengan uraian NULL dalam Neraca Percobaan serta selisih nilai surplus defisit antara LO dengan LPE pada Satker Z. Pencatatan yang timbul dari transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kas masuk yang berasal dari penyetoran oleh wajib bayar kepada bendahara dicatat pada Modul Bendahara sebagai penerimaan SBS, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111711/ 111821	Kas di Bendahara Penerimaan/ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.000.000	Neraca
K	425916	NULL	1.000.000	-
Buku besar akrual				

- b. Selanjutnya, bendahara melakukan penyetoran ke kas negara dan mencatatnya pada Modul Bendahara sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	1.000.000	LPE
K	111711/ 111821	Kas di Bendahara Penerimaan/ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.000.000	Neraca
Buku besar akrual				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	1.000.000	-
K	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL	1.000.000	LRA
Buku besar kas				

- c. Atas kondisi ini, satker menindaklanjuti dengan melakukan ralat dokumen setoran dengan berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014. Penghapusan dokumen setoran lama dan pencatatan ralat bukti setoran pada Modul Bendahara menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	425916	NULL	1.000.000	-
K	313121	Diterima dari Entitas Lain	1.000.000	LPE
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	1.000.000	LPE
K	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	1.000.000	LO
Buku besar akrual				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL	1.000.000	LRA
K	313121	Diterima dari Entitas Lain	1.000.000	-
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	1.000.000	-
K	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	1.000.000	LRA
Buku besar kas				

Ilustrasi 1c: penerimaan negara melalui potongan SPM

Pada Satker Z, terdapat pengembalian belanja honor TAYL senilai Rp1.000.000 yang dilakukan melalui potongan SPM. Satker salah mencantumkan akun pengembalian belanja hibah TAYL (425916) pada kolom potongan SPM. Pencatatan yang timbul dari transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat resume tagihan (penerbitan SPP/SPM) dengan potongan akun 425916 pada Modul Pembayaran, terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115212	Piutang Lainnya	1.000.000	Neraca
K	425916	NULL	1.000.000	-
Buku besar akrual				

- b. Setelah terbit SP2D dan dilakukan pencatatan SP2D melalui Modul Pembayaran, terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	1.000.000	LPE
K	115212	Piutang Lainnya	1.000.000	Neraca
Buku besar akrual				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	1.000.000	-
K	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL	1.000.000	LRA
Buku besar kas				

- c. Atas kondisi ini, satker melakukan ralat data penerimaan negara tersebut dengan berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014. Pencatatan ralat SP2D pada Modul Pembayaran membentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	425916	NULL	1.000.000	-
K	313121	Diterima dari Entitas Lain	1.000.000	LPE
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	1.000.000	LPE
K	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	1.000.000	LO
Buku besar akrual				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL	1.000.000	LRA
K	313121	Diterima dari Entitas Lain	1.000.000	-
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	1.000.000	-

K	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	1.000.000	LRA
Buku besar kas				

2. Terdapat akun pendapatan (425xxx) dengan uraian NULL di sisi debit pada buku besar akrual

Ilustrasi 2: kesalahan pemilihan akun ketika melakukan penjurnalan pada Modul GLP

Pada Satker W, terdapat pendapatan layanan senilai Rp5.000.000 yang belum diterima pembayarannya sehingga Satker W mencatat timbulnya piutang PNBPN pada bulan September 2022. Satker W belum menggunakan Modul Piutang sehingga seluruh transaksi terkait piutang direkam melalui penjurnalan pada Modul GLP.

Pada bulan Oktober 2022, diketahui bahwa terjadi kesalahan pencatatan di mana nilai piutang PNBPN dan pendapatan seharusnya sebesar Rp4.500.000. Satker W melakukan penyesuaian pencatatan piutang PNBPN dan pendapatan melalui penjurnalan pada Modul GLP, namun terjadi kesalahan pemilihan akun 425746 (Pendapatan Lain-lain atas Rekening Tujuan). Akun tersebut tidak seharusnya digunakan oleh K/L sehingga berdampak pada munculnya akun NULL dalam laporan keuangan. Pencatatan atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengakuan pendapatan terutang (piutang PNBPN)

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115xxx	Piutang PNBPN	5.000.000	Neraca
K	425xxx	Pendapatan Layanan xxx	5.000.000	LO

- b. Penyesuaian nilai piutang TAB

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	425746	NULL	500.000	-
K	115xxx	Piutang PNBPN	500.000	Neraca

- c. Atas kondisi tersebut, Satker W melakukan tindak lanjut berupa penjurnalan melalui Modul GLP untuk mengeliminasi akun NULL dan memunculkan akun yang seharusnya sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	425xxx	Pendapatan Layanan xxx	5.000.000	LO
K	425746	NULL	500.000	-

3. Terdapat akun belanja modal (53xxxx) dengan uraian NULL di sisi kredit pada buku besar akrual

Ilustrasi 3: pengembalian belanja modal

Pada Satker A, terdapat realisasi belanja modal peralatan dan mesin (akun 532111) sebesar Rp30.000.000. Pada semester yang sama, terjadi pengembalian belanja modal peralatan dan mesin yang berdampak pada koreksi kurang nilai aset sebesar Rp4.000.000. Pencatatan transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan BAST pada Modul Komitmen

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	532111	Aset Belum Diregister	30.000.000	Neraca
K	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	30.000.000	Neraca

- b. Pendetailan peralatan dan mesin pada Modul Aset Tetap

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	132111	Peralatan dan Mesin	30.000.000	Neraca
K	532111	Aset Belum Diregister	30.000.000	Neraca

- c. Penerbitan SPP/SPM pada Modul Pembayaran

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	30.000.000	Neraca
K	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	30.000.000	Neraca

- d. Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	30.000.000	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	30.000.000	LPE
Buku besar kas				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000	LRA

K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	30.000.000	-
Buku besar kas				

e. Pencatatan pengembalian belanja pada Modul Bendahara

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	4.000.000	LPE
K	532111	NULL	4.000.000	-
Buku besar kas				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	4.000.000	-
K	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000	LRA
Buku besar kas				

f. Pencatatan transaksi koreksi nilai pada Modul Aset Tetap

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4.000.000	LPE
K	132111	Peralatan dan Mesin	4.000.000	Neraca

g. Atas kondisi ini, tindak lanjut yang harus dilakukan oleh satker untuk mengeliminasi akun NULL adalah melakukan penjurnalan melalui Modul GLP sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	532111	NULL	4.000.000	
K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4.000.000	LPE

4. Terdapat akun belanja barang yang menghasilkan persediaan (5218xx, 523xxx, 525xxx) dengan uraian NULL di sisi kredit pada buku besar akrual

Ilustrasi 4: pengembalian belanja barang yang menghasilkan persediaan TAB

Pada Satker B, terdapat realisasi belanja barang persediaan barang konsumsi (akun 521811) sebesar Rp10.000.000. Pada periode yang sama, terjadi pengembalian belanja dengan akun 521811 yang berdampak pada koreksi kurang nilai persediaan sebesar Rp500.000. Pencatatan transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pencatatan BAST pada Modul Komitmen

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117911	Persediaan Belum Diregister	10.000.000	Neraca
K	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	10.000.000	Neraca

b. Pendetailan persediaan pada Modul Persediaan

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117111	Barang Konsumsi	10.000.000	Neraca
K	117911	Persediaan Belum Diregister	10.000.000	Neraca

c. Penerbitan SPP/SPM pada Modul Pembayaran

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	10.000.000	Neraca
K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	10.000.000	Neraca

d. Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	10.000.000	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	10.000.000	LPE
Buku besar akrual				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10.000.000	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	10.000.000	-
Buku besar kas				

e. Pencatatan pengembalian belanja pada Modul Bendahara

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	500.000	LPE
K	521811	NULL	500.000	-
Buku besar akrual				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	500.000	-
K	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	500.000	LRA
Buku besar kas				

- f. Pencatatan transaksi koreksi nilai pada Modul Persediaan (dalam hal persediaan tersebut belum terjadi pemakaian)

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	500.000	LO
K	117111	Barang Konsumsi	500.000	Neraca

- g. Pencatatan transaksi koreksi nilai pada Modul Persediaan (dalam hal persediaan tersebut telah terjadi pemakaian)

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	500.000	LO
K	117111	Barang Konsumsi	500.000	Neraca
D	117111	Barang Konsumsi	500.000	Neraca
K	593111	Beban Persediaan Konsumsi	500.000	LO

- h. Atas kondisi ini, tindak lanjut yang harus dilakukan oleh satker untuk mengeliminasi akun NULL adalah melakukan penjurnalan melalui Modul GLP sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521811	NULL	500.000	-
K	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	500.000	LO

5. Terdapat akun belanja barang yang menghasilkan persediaan (5218xx, 523xxx, 525xxx) dengan uraian NULL di sisi debit pada buku besar akrual

Ilustrasi 5a: pembelian persediaan menggunakan akun belanja yang menghasilkan persediaan, namun salah memilih BAST barang ekstrakomptabel

Pada Satker C, terdapat pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) melalui realisasi belanja barang persediaan barang konsumsi (akun 521811) sebesar Rp850.000. Pada saat merekam BAST melalui Modul Komitmen, terjadi kesalahan pemilihan BAST

jasa/non aset/belanja modal pengembangan di bawah kapitalisasi aset, di mana Satker B mendetailkan barang berupa peralatan dan mesin ekstrakomptabel. Pencatatan transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pencatatan BAST pada Modul Komitmen

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521811	NULL	850.000	-
K	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	850.000	Neraca

b. Pendetailan peralatan dan mesin ekstrakomptabel pada Modul Aset Tetap

Tidak membentuk jurnal

c. Penerbitan SPP/SPM pada Modul Pembayaran

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	850.000	Neraca
K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	850.000	Neraca

d. Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	850.000	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	850.000	LPE
Buku besar akrual				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	850.000	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	850.000	-
Buku besar kas				

- e. Pencatatan perolehan persediaan melalui reklasifikasi dari peralatan dan mesin ekstrakomptabel menjadi barang konsumsi

- 1) Reklasifikasi keluar peralatan dan mesin ekstrakomptabel pada Modul Aset Tetap

Tidak membentuk jurnal

- 2) Reklasifikasi masuk barang konsumsi pada Modul Persediaan

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117111	Barang Konsumsi	850.000	Neraca
L	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	850.000	LPE

- f. Atas kondisi ini, tindak lanjut yang harus dilakukan oleh satker untuk mengeliminasi akun NULL adalah melakukan penjurnalan melalui Modul GLP sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset	850.000	LPE
K	521811	NULL	850.000	-

Ilustrasi 5b: pembelian barang ekstrakomptabel menggunakan akun belanja barang yang menghasilkan persediaan, memilih BAST barang ekstrakomptabel

Pada Satker B, terdapat pembelian peralatan dan mesin ekstrakomptabel melalui realisasi belanja barang persediaan barang konsumsi (akun 521811) sebesar Rp900.000. Pada saat merekam BAST melalui Modul Komitmen, dipilih BAST jasa/non aset/belanja modal pengembangan di bawah kapitalisasi aset, di mana Satker B mendetailkan barang berupa peralatan dan mesin ekstrakomptabel melalui Modul Aset Tetap. Pencatatan transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan BAST pada Modul Komitmen

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521811	NULL	900.000	-
K	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	900.000	Neraca

- b. Pendetailan peralatan dan mesin ekstrakomptabel pada Modul Aset Tetap

Tidak membentuk jurnal

c. Penerbitan SPP/SPM pada Modul Pembayaran

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	900.000	Neraca
K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	900.000	Neraca

d. Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	900.000	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	900.000	LPE
Buku besar akrual				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	900.000	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	900.000	-
Buku besar kas				

- e. Atas kondisi ini, tindak lanjut yang harus dilakukan oleh satker untuk mengeliminasi akun NULL adalah melakukan penjurnalan melalui Modul GLP sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521252	Beban Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	900.000	LO
K	521811	NULL	900.000	-

- f. Selain itu, mengingat adanya ketidaksesuaian akun dengan kodefikasi barang (pembelian barang ekstrakomptabel menggunakan akun belanja barang yang menghasilkan persediaan), satker agar melakukan ralat akun pada dokumen pelaksanaan dan/atau dokumen penganggaran dari akun 521811 menjadi akun 521252, dengan berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014. Pencatatan dokumen ralat SP2D tersebut memunculkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	900.000	-

K	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	900.000	LRA
D	521252	Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	900.000	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	900.000	-
Buku besar kas				

- g. Apabila berdasarkan pertimbangan manajemen satker tidak melakukan ralat akun pada dokumen pelaksanaan dan/atau dokumen penganggaran, ketidaksesuaian akun dengan kodefikasi barang tersebut akan tetap termonitor dalam MONSAKTI.

Ilustrasi 5c: pembelian persediaan dengan akun belanja barang yang menghasilkan persediaan, namun tidak melakukan perekaman BAST

Pada Satker C, terdapat pembelian alat tulis melalui realisasi belanja barang persediaan barang konsumsi (akun 521811) sebesar Rp625.000, namun satker tidak merekam BAST melalui Modul Komitmen. Ketika akan dilakukan pembayaran, Satker C membuat SPP dengan akun 521811 tanpa BAST. Pencatatan transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan persediaan pada Modul Persediaan

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117111	Barang Konsumsi	625.000	Neraca
K	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	625.000	LO

- b. Perekaman SPP/SPM dengan akun 521811 tanpa BAST pada Modul Pembayaran

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521811	NULL	625.000	-
K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	625.000	Neraca

- c. Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	625.000	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	625.000	LPE
Buku besar akrual				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	625.000	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	625.000	-
Buku besar kas				

- d. Atas kondisi ini, tindak lanjut yang harus dilakukan oleh satker untuk mengeliminasi akun NULL adalah melakukan penjurnalan melalui Modul GLP sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	625.000	LO
K	521811	NULL	625.000	-

6. Terdapat akun belanja modal (53xxxx) dengan uraian NULL di sisi debet pada buku besar akrual

Ilustrasi 6: pembelian aset tetap/aset lainnya dengan akun belanja modal, namun tidak melakukan perekaman BAST

Pada Satker D, terdapat pembelian peralatan dan mesin melalui realisasi belanja modal (akun 532111) sebesar Rp3.000.000, namun satker tidak merekam BAST melalui Modul Komitmen. Ketika akan dilakukan pembayaran, Satker D membuat SPP dengan akun 532111 tanpa BAST. Pencatatan transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan peralatan dan mesin pada Modul Aset Tetap

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	132111	Peralatan dan Mesin	3.000.000	Neraca
K	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	3.000.000	LO

- b. Perekaman SPP/SPM dengan akun 532111 tanpa BAST pada Modul Pembayaran

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	532111	NULL	3.000.000	-
K	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	3.000.000	Neraca

c. Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	3.000.000	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	3.000.000	LPE
Buku besar akrual				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	3.000.000	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	3.000.000	-
Buku besar kas				

- d. Atas kondisi ini, tindak lanjut yang harus dilakukan oleh satker untuk mengeliminasi akun NULL adalah melakukan penjurnalan melalui Modul GLP sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	625.000	LO
K	532111	NULL	3.000.000	-

7. Selain ilustrasi transaksi yang dapat berdampak pada munculnya akun dengan uraian NULL di atas, terdapat pula ketidaksesuaian akun di mana pembelian persediaan atau aset tetap/aset lainnya dilakukan menggunakan akun yang tidak seharusnya (selain akun belanja modal dan akun belanja barang yang menghasilkan persediaan). Atas kondisi ini, tidak muncul akun dengan uraian NULL namun diperlukan penjurnalan oleh satker melalui Modul GLP untuk mengeliminasi beban yang tidak seharusnya.

Ilustrasi 7a: pembelian persediaan tidak menggunakan akun belanja barang yang menghasilkan persediaan

Pada Satker E, terdapat pembelian persediaan senilai Rp4.500.000 yang direalisasikan menggunakan belanja bahan (akun 521211). Atas kondisi tersebut, Satker E merekam BAST non barang pada Modul Komitmen. Pencatatan transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pencatatan BAST pada Modul Komitmen

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521211	Beban Bahan	4.500.000	LO

K	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	4.500.000	Neraca
---	--------	--------------------------------------	-----------	--------

b. Pencatatan persediaan pada Modul Persediaan

Mengingat bahwa pencatatan BAST pada Modul Komitmen dilakukan dengan memilih BAST non barang, maka Satker E tidak dapat merekam perolehan persediaan tersebut melalui menu pembelian. Untuk itu, Satker E merekam persediaan dimaksud melalui menu perolehan lainnya

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117111	Barang Konsumsi	4.500.000	Neraca
K	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	4.500.000	LO

c. Penerbitan SPP/SPM pada Modul Pembayaran

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	4.500.000	Neraca
K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	4.500.000	Neraca

d. Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	4.500.000	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	4.500.000	LPE
Buku besar akrual				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521211	Belanja Bahan	4.500.000	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	4.500.000	-
Buku besar kas				

- e. Atas ketidaksesuaian akun ini (pembelian persediaan menggunakan akun belanja bahan), satker agar melakukan ralat akun pada dokumen pelaksanaan dan/atau dokumen penganggaran dari akun 521211 menjadi akun 521811, dengan berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014. Pencatatan dokumen ralat SP2D tersebut memunculkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	4.500.000	-
K	521211	Belanja Bahan	4.500.000	LRA
D	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.500.000	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	4.500.000	-
Buku besar kas				

- f. Selain itu, satker melakukan penjurnalan melalui Modul GLP untuk mengeliminasi beban yang tidak seharusnya sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	4.500.000	LO
K	521211	Beban Bahan	4.500.000	LO

- g. Apabila berdasarkan pertimbangan manajemen satker tidak melakukan ralat akun pada dokumen pelaksanaan dan/atau dokumen penganggaran, ketidaksesuaian akun dengan kodefikasi barang tersebut akan tetap termonitor dalam MONSAKTI.

Ilustrasi 7b: pembelian aset tetap/aset lainnya tidak menggunakan akun belanja modal akun 53xxxx)

Pada Satker E, terdapat pembelian peralatan dan mesin senilai Rp7.500.000 yang direalisasikan menggunakan belanja bahan (akun 521211). Atas kondisi tersebut, Satker E merekam BAST non barang pada Modul Komitmen. Pencatatan transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan BAST pada Modul Komitmen

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521211	Beban Bahan	7.500.000	LO
K	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	7.500.000	Neraca

- b. Pencatatan peralatan dan mesin pada Modul Aset Tetap

Mengingat bahwa pencatatan BAST pada Modul Komitmen dilakukan dengan memilih BAST non barang, maka Satker E tidak dapat merekam perolehan peralatan dan mesin tersebut melalui menu pembelian. Untuk itu, Satker E merekam peralatan dan mesin dimaksud melalui menu perolehan lainnya

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	132111	Peralatan dan Mesin	7.500.000	Neraca
K	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	7.500.000	LO

c. Penerbitan SPP/SPM pada Modul Pembayaran

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	7.500.000	Neraca
K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	7.500.000	Neraca

d. Pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	7.500.000	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	7.500.000	LPE
Buku besar akrual				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521211	Belanja Bahan	7.500.000	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	7.500.000	-
Buku besar kas				

- e. Atas ketidaksesuaian akun ini (pembelian peralatan dan mesin menggunakan akun belanja bahan), satker agar melakukan ralat akun pada dokumen pelaksanaan dan/atau dokumen penganggaran dari akun 521211 menjadi akun 532111, dengan berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014. Pencatatan dokumen ralat SP2D tersebut memunculkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	7.500.000	-
K	521211	Belanja Bahan	7.500.000	LRA
D	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	7.500.000	-
Buku besar kas				

- f. Selain itu, satker melakukan penjurnalan melalui Modul GLP untuk mengeliminasi beban yang tidak seharusnya sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	7.500.000	LO
K	521211	Beban Bahan	7.500.000	LO

- g. Apabila berdasarkan pertimbangan manajemen satker tidak melakukan ralat akun pada dokumen pelaksanaan dan/atau dokumen penganggaran, ketidaksesuaian akun dengan kodefikasi barang tersebut akan tetap termonitor dalam MONSAKTI.

Catatan:

Setiap jurnal yang dilakukan melalui Modul GLP agar dilengkapi dengan Memo Penyesuaian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan dilampiri dokumen pendukung terkait.

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI